

TRANSFORMASI DINASTI POLITIK ISLAM: DARI OTORITARIANISME MENUJU DEMOKRASI

Deyva Wihardja Utama¹, Rian Purnama², Davisha Becky Aurellia³, Alisha Dwi Haryanti⁴, Muhammad Badar Rabi Laissyahmi⁵

Universitas Pendidikan Indonesia

deyvaw7@upi.edu¹, rianpurnama103@upi.edu², davishaaurel@upi.edu³, alishadh@upi.edu⁴, laissyahmi@upi.edu⁵

*Corresponding Author: Muhamad Parhan

✉ parhan.muhamad@upi.edu

Abstrak: Transisi sistem pemerintahan otoriter menjadi demokrasi di Indonesia masih dan sedang berlanjut. Transisi ini mengalami banyak hal yang menarik untuk dikaji secara dalam dan terstruktur dengan bahasan kompleks karena juga berkaitan dengan politik dinasti yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode kajian pustaka, dengan fokus pada penelaahan atau pengkajian data pustaka yang relevan untuk topik-topik yang dibahas serta dibicarakan. Kajian ini memiliki konsep deskriptif-analitik yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memaparkan fakta yang ditemukan, sekaligus menganalisis masalah dan menemukan korelasi antara berbagai elemen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa poin, yaitu pandangan politik menurut Islam dan transisi sistem pemerintahan Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi; Islam; Otoriter; Politik Dinasti; Transisi.

Abstract: *The transition from an authoritarian government system to democracy in Indonesia is still and is continuing. This transition experienced many interesting things that need to be studied in depth and structured with complex discussion because it is also related to dynastic politics that occurred in Indonesia. This research applies the literature review method, with a focus on reviewing or examining library data that is relevant to the topics discussed and discussed. This study has a descriptive-analytic concept, which aims to describe, explain and explain the facts found, as well as analyze problems and find correlations between various related elements. The results of this research show several points, namely political views according to Islam and the transition to the Indonesian government system.*

Keywords: *Authoritarianism; Democracy; Dynasty Politics; Islam; Transition*

PENDAHULUAN

Sejarah politik Islam sering kali ditandai oleh dominasi dinasti yang mengedepankan kekuasaan absolut. Otoritarianisme merupakan salah satu contoh dari hal tersebut yang merupakan suatu kekuasaan politik terkonsentrasi pada satu individu, kelompok, atau institusi yang memiliki otoritas mutlak atau sangat besar dalam mengambil keputusan, seringkali tanpa mempertimbangkan kehendak rakyat atau partisipasi luas dalam proses politik (Nisfu Kurniyatillah et al., 2020). Dalam sistem otoriter, pemimpin atau kelompok penguasa cenderung mengendalikan hampir semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial, sering kali melalui penggunaan kekuatan atau intimidasi untuk mempertahankan kekuasaan, otoritarianisme dalam konteks ini tidak hanya mencakup penguasaan politik, tetapi juga pengendalian seorang pemimpin yang mementingkan terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat. Namun, dengan munculnya tuntutan untuk reformasi dari partisipasi masyarakat dan beberapa kalangan dalam proses politik, ada dorongan yang kuat untuk beralih ke sistem yang lebih demokratis yaitu dimana suatu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang berdaulat untuk menentukan kebijakan dan kepemimpinan negara melalui mekanisme pemilihan umum atau proses partisipasi politik lainnya. Dalam demokrasi, hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berpendapat, dan kebebasan sangat dijunjung tinggi. Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup bersama, sehingga tidak terjadi kekuasaan yang mementingkan diri sendiri. (Ilham Budiman & Aprillinda, 2024;

Rahma Satya et al., 2021).

Dunia Islam memiliki potensi untuk kembali ke masa keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi jika masyarakat Muslim dapat memahami dan memaknai sejarah Islam dengan benar beserta mempunyai pemimpin yang bijak. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi menuju demokrasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan politik, tetapi juga dengan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Islam yang lebih progresif.

Perubahan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal, termasuk globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan meningkatnya kesadaran politik di kalangan beberapa kalangan terutama di kalangan muda. Dengan demikian, jurnal ini

bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika tersebut dan memberikan wawasan tentang bagaimana proses transformasi ini dapat berlangsung yaitu mulai dari politik yang otoriter sampai politik demokrasi dalam konteks yang kompleks dan beragam di dunia Islam.

METODE PENELITIAN

Merupakan sebuah gambaran atau hal yang perlu dilakukan untuk menemukan data atau hasil nanti yang akan dibahas di bagian hasil dan pembahasan. Pada konteks ini peneliti melakukan penelitian mengenai Transformasi Dinasti Politik Islam: Dari Otoritarianisme Menuju Demokrasi dengan kajian pustaka, yaitu penelitian yang memfokuskan untuk menelaah dan mengkaji sumber-sumber yang sudah ada atau tertera dalam pustaka yang bisa berupa data primer ataupun sekunder untuk bisa membantu mengkaji konteks yang sedang dibahas dengan lebih baik. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang memiliki tujuan untuk menjelaskan, menganalisa, dan memberikan fakta terkait hal yang sudah ditemukan dalam proses penelitian atau pengkajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi tentang sistem pemerintahan otoriter dimulai sejak menjelang dan setelah Perang Dunia II. Erich Fromm (1960) melihat otoritarianisme sebagai karakter sosial, yaitu menyalurkan dorongan eksistensial untuk berhubungan dengan orang lain secara tidak produktif. Relasi atau hubungan antar manusia yang ideal adalah cinta, sementara otoritarianisme adalah kebalikannya, yakni dominasi dan submisi. Orang-orang otoritarian hanya melihat realitas dengan pandangan sempit dan hanya sebagai tempat perebutan kekuasaan (Jamaludin, 2023).

Banyak ahli melihat sistem otoriter ini sebagai salah satu bentuk kepribadian menggambarkan yang memberi gambaran sebagai kecenderungan kepribadian untuk tunduk dan patuh pada otoritas atau kelompok, baik yang tercermin dalam individu-individu berkuasa (otoritarian submisif) maupun dalam nilai-nilai normatif (konvensionalisme), serta kecenderungan untuk bersikap dan bertindak agresif terhadap orang atau kelompok yang dianggap berbeda dan menentang nilai-nilai masyarakat (otoritarian agresif) (Hartoko, 2016).

Kekuasaan dalam pemerintahan adalah elemen atau hal yang sangat penting karena ini akan berdampak kepada tingkat keberhasilan suatu pemerintah dalam melakukan kewajibannya mengurus negara dengan baik. Namun, kesalahan otoritarianisme dan para pengikutnya ini adalah memandang kekuasaan sebagai tujuan akhir untuk dirinya sendiri, bukan sebagai sarana. Oleh karena itu, yang penting bagi mereka adalah bagaimana kekuasaan berfungsi, digunakan dan diperlihatkan. Setelah jatuhnya Soeharto, terjadilah masa transisi yang sulit dan rezim-rezim pemerintahan zaman Soeharto pun belum hilang 100%.

Saat ini, Indonesia sedang menjalani dan melakukan proses transisi dari era Soeharto dulu, namun masih dalam keadaan labil. Sistem lama yang otoritarian sudah kehilangan legitimasi dan basis moralnya, sementara konsensus tentang sistem pemerintahan yang baru belum terjadi atau tercipta dengan baik (Denny, 2021) karena periode transisi ini harus menjadi bagian perhatian penting dari pemerintah, sebab negara Indonesia dan rakyatnya

tidak ingin seperti Nigeria tahun 1999 yang mengalami hal serupa, yaitu peralihan atau transisi dari otoritarian ke demokrasi, namun kenyataannya Nigeria malah kembali menjadi negara dengan sistem otoritarian.

Runtuhnya rezim-rezim otoriter/totaliter juga dianggap sebagai kemenangan kaum kapitalisme-liberalisme, sebagai dasar demokrasi, yang menghapus pandangan negatif terhadap kapitalisme-liberalisme (Adolph, 2016).

Setelah akhirnya meninggalkan sistem pemerintahan orde lama dan beralih ke pemerintahan orde baru (orba), Indonesia tidak serta merta menjadi negara demokratis. Awalnya, masyarakat memiliki harapan besar bahwa pemerintahan baru (orde baru) akan menjadikan Indonesia lebih demokratis.

Masa peralihan pemerintahan ini sekaligus dibarengi cetusan gerakan reformasi yang makin menggaung saat ini di Indonesia, ketika aparatur pemerintahan sudah tidak lagi fokus dalam mengurus rakyat melainkan malah mengurus keluarga dan jabatannya. Akhirnya gaungan kata reformasi makin meninggi di kalangan lapisan masyarakat terlebih mahasiswa yang cinta terhadap demokrasi Indonesia. Hal ini berkaitan dengan terjadinya praktik demokrasi yang salah dan menyeleweng, yaitu dinasti politik atau politik dinasti.

Dinasti Politik ini digunakan sebagai alat atau cara paling tepat untuk melanjutkan kekuasaan dengan cara memberikan tongkat estafet kekuasaan tersebut kepada garis keturunannya (Rahma et al, 2022).

Konsep dari politik dinasti atau dinasti politik ini adalah perilaku politik, strategi, orientasi politik yang akhirnya menjadi budaya politik masyarakat Indonesia. Jika melihat sistem politik dinasti ini di Indonesia itu memiliki tujuan paling pertama dan utama adalah untuk regenerasi atau melanjutkan sebuah sistem pemerintahan yang bisa dikatakan sebagai tongkat estafet dari satu pemimpin kepada seseorang yang memiliki hubungan darah dengannya. Selain itu, tongkat estafet tersebut bisa dilanjutkan tidak hanya oleh seseorang yang sedarah dengannya, tapi juga dengan ikatan perkawinan, atau bisa karena berada dalam satu lingkungan keluarga besar yang sama. Praktik sistem politik dinasti di Indonesia sendiri sudah berlangsung dari lama sekali, bahkan sejak era orde baru dengan temuan bukti keluarga cendana yang sekaligus menjadi memberikan bukti bahwa politik dinasti sangat mempengaruhi demokrasi di Indonesia.

Fakta lapangan saat ini banyak menunjukkan bahwa maraknya praktik politik dinasti atau dinasti politik ini yang tentu bisa memberikan efek negatif terhadap sebuah negara. Dengan adanya dan fakta di lapangan yang bersifat nyata ini semakin menunjukkan bahwa politik dinasti ini telah menimbulkan kekhawatiran yang tinggi serta telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Karena praktik politik dinasti ataupun dinasti politik ini banyak sekali efek negatif yang akan ditimbulkan baik untuk hal kecil atau hal besar yang menyangkut rakyat dan pemerintah (Panggabean dan Harahap, 2024). Contoh kasus di lapangan sudah sangat menunjukkan betapa berbahayanya praktik strategi ini, bahkan pada kenyataannya, orang kompeten yang sebenarnya bisa memimpin dengan baik kalah oleh seorang pewaris dinasti yang identik sekali dengan sistem kerajaan ini. Jadi pada akhirnya, persaingan dalam mencalonkan diri sebagai seorang pemerintahan dirasa akan sulit karena melawan rezim kekuasaan yang semena-mena mengubah aturan.

Dalam Islam sendiri, ranah atau bagian politik ini menjadi hal yang sangat penting dan menjadi ulasan yang sangat menarik apabila dikaji oleh sarjana-sarjana muslim ataupun para civitas akademika muslim yang ingin mengetahui politik dalam Islam secara lebih luas detail dan menyeluruh (Adam, 2022).

Islam sendiri tidak acuh terhadap praktik politik dan memiliki aturannya tersendiri untuk seperti apa dan bagaimana cara berpolitik yang benar itu. Politik di dalam Islam sering kali dikenal dengan sebutan kata *Siyasah Syariyyah* Kata *al-Siyasah* juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan

memimpinya (Abdullah Zawawi, 2015).

Dalam pengertian siyasah, secara implisit terdapat dua dimensi yang saling berhubungan, yaitu; 1. "Tujuan" yang ingin dicapai melalui proses pengendalian, dan; 2. "Cara" pengendalian untuk mencapai tujuan tersebut. Politik Islam juga bisa dikatakan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seorang umat Islam yang mana dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam berpolitik, karena dalam Islam sendiri itu mencakup akidah dan syariat (Havis Aravik, 2021).

Lalu, menurut istilah politik agama Islam politik adalah yang mengurus semua kemaslahatan rakyat atau umat sesuai dengan syara'. Menurut Ibn A'qil, seperti dikutip oleh Ibnu Qayyim, siyasah Islam adalah segala tindakan yang mendekatkan manusia pada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh Rasulullah atau bahkan Allah SWT. Pandangan politik menurut syara' pada kenyataannya selalu terkait dengan pengaturan urusan rakyat, baik oleh negara maupun rakyat sendiri.

Pandangan lain tentang keterkaitan antara Islam dan politik muncul dari kalangan ternama seperti Dr. Schacht yang berpendapat, Islam bukan hanya sebatas Agama atau kepercayaan, Islam juga mengatur tentang banyak hal termasuk politik dan berbagai aturan lainnya (Rais, 2001).

Selanjutnya, dalam konteks politik Islam, setidaknya memiliki tiga ranah berbeda yang ada dan termasuk ke dalam politik Islam yaitu; pertama, Siyasah Dusturiyah yang memiliki makna secara umum aturan-aturan atau teori-teori yang digunakan untuk mengelola negara dan masalah perundang-undangan yang harus selaras serta sejalan

dengan pandangan agama Islam. Kedua, Siyasah Dauliyah yang mencakup tata kelola negara dan teori-teori tentang hubungan internasional serta hubungan antar negara yang ada. Ketiga, Siyasah Maaliyah yang biasa disebut dengan sistem atau aturan yang mengatur tentang sistem ekonomi dalam Islam. Adanya sistem ini tentunya pasti ada hal lain yang mendukung dalam kehadirannya untuk membantu keberhasilan yang akan dicapai dalam proses pelaksanaannya, yaitu dengan adanya prinsip-prinsip politik dalam Islam yang meliputi: pertama, sistem musyawarah atau biasa juga dikenal sebagai (As-Syurah) dan prinsip musyawarah ini tercantum dalam Al-Qur'an surat As-Syurah ayat 38; Kedua, al-Adl (keadilan) yang menjadi prinsip politik Islam yang kedua dan menjadi hal yang sangat penting sekaligus sesuai dengan dasar negara pancasila. Ketiga, Al-Hurriyah atau bisa diartikan dengan kemerdekaan atau kebebasan. Kebebasan dan kemerdekaan ini terutama terletak pada kebebasan hati nurani. Keempat, Al-Musaawah yang memiliki arti persamaan. Persamaan ini memiliki aspek yang cukup luas jika dalam Islam, seperti persamaan keadilan hukum, persamaan sosial atau dalam sektor ekonomi.

Dalam pandangan Islam, tidak ditemukan adanya aturan atau penjelasan rinci mengenai perilaku politik dalam bernegara. Dalam sejarah Islam, dinasti politik tidak memiliki perintah atau larangan yang jelas. Namun, Islam tetap membuat atau mengatur secara spesifik tentang seperti apa sikap atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu diantaranya adalah badan yang sehat dan pemikiran yang luas atau terbuka. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 247, yang artinya : Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana (mungkin) dia memperoleh kerajaan (kekuasaan) atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" (Nabi mereka) menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik." Allah menganugerahkan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki.

Dasar hukum lain dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa seorang pemimpin harus Amanah dan adil seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 58-59 yang menjelaskan kepada hamba-nya untuk berlaku adil kepada seseorang yang memang memiliki

hak untuk diberi keadilan.

Tentu, maraknya praktik politik dinasti saat ini memiliki faktor penyebab yang perlu ditangani. Faktor-faktor tersebut meliputi; 1) Keinginan individu atau keluarga untuk memegang kekuasaan untuk menjadi penerus; 2) Seseorang atau lebih banyak orang tertentu yang terorganisir karena adanya hal yang disetujui sebelumnya, dan hal ini kemudian membuat kelompok baru untuk melanjutkan hal yang sama; 3) Terjadinya kerja sama antara 2 orang atau lebih yang memiliki pengaruh besar di suatu negara. Bisa terjadi melibatkan politikus dan pebisnis handal; 4) Pembagian tugas antara kekuasaan politik dan kekuasaan modal yang mengakibatkan korupsi. Karena hal itu, dinasti politik tidak cocok diterapkan di Indonesia. Karena Indonesia bukanlah negara monarki yang mengedepankan hal seperti itu dalam memilih seorang pemimpin atau dengan kalimat lainnya yaitu menggunakan sistem keturunan dalam pemilihan, tapi harus sesuai dengan asas negara Indonesia dan aturan Islam yang harusnya bersifat mengedepankan demokrasi bukan dinasti.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk memilih kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka (Rangkuti, 2019).

Rakyat tetap berada di garda terdepan dan pemegang penuh kekuasaan. Karena kekuasaan yang sesungguhnya itu bukan milik pemerintah atau raja, tapi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat itu sendiri (Zulhilmi, n.d.)

Karena pada dasarnya, demokrasi menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan prioritas penuh untuk rakyat. Namun, saat ini konsep tersebut telah bergeser menjadi dari rakyat, oleh penguasa, dan untuk penguasa, karena rakyat sering kali hanya dijadikan objek untuk mencapai kekuasaan. Hal ini tentunya menjadi boomerang dan bahkan terbalik, sehingga pada akhirnya rakyat seolah-olah hanya diberikan harapan dan janji manis serta hanya dimanfaatkan saja oleh pemerintah dalam caranya mengambil jalan untuk kekuasaan.

KESIMPULAN

Indonesia mengalami beberapa fase sistem pemerintahan yang terjadi dengan perbedaannya masing-masing dari setiap sistem pemerintahan yang digunakan. Transisi pergeseran dari masa orde baru yang bersifat otoriter menuju sistem demokrasi yang baru belum sepenuhnya berjalan dan berlangsung baik. Pada kenyataannya, masih banyak orang yang belum mengerti mengenai demokrasi itu sendiri. Gaungan dan teriakan reformasi makin dikencangkan guna menuntut pemerintah untuk segera berubah dan memperbaiki segala macam hal yang rakyat anggap penting dan prioritaskan. Teriakan reformasi pun makin mencuat di permukaan atas kejadian yang banyak membuat mata menyorot tentang perilaku serta tindak menyeleweng dari pemerintah, yaitu politik dinasti. Tentu, hal atau praktik ini tidak bisa dianggap benar oleh kalangan masyarakat, sehingga banyak aksi yang dilakukan, suara yang dikencangkan demi tetap menjaga keutuhan demokrasi serta pemerintahan yang sesuai dengan peraturan dan amanat undang-undang. Hal ini pun sesuai dengan ajaran Islam yang harus mengedepankan demokrasi dan kedaulatan rakyat daripada urusan atau hal pribadi lainnya. Tentunya, dalam Islam, kemaslahatan umat menjadi poin utama dan prioritas terpenting dalam sebuah negara. Hubungan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pun juga selaras dengan prinsip politik Islam yang mengedepankan kedaulatan dan kemajuan rakyatnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zawawi. 2015. "Politik Dalam Pandangan Islam." *Ummul Quro* 5 (Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015): 85–100.
- Adam, Yusrif Fahmi. 2022. "Islam Dan Politik Identitas: Konflik Pada Gerakan 212 Dalam Perspektif Sejarah Indonesia." *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 6 (2): 88–103. <https://doi.org/10.23971/njppi.v6i2.4395>.

- Adolph, Ralph. 2016. "POLA TRANSISI DEMOKRASI YANG TERJADI DI INDONESIA DAN BRASIL," 1–23.
- Denny. 2021. *Jatuhnya Soeharto Dan Transisi Demokrasi Indonesia*. inspirasi.co.
- Hartoko, Victorius Didik Suryo. 2016. "Otoritarianisme Dan Dukungan Terhadap Demokrasi: Kajian Meta Analisis." *Buletin Psikologi* 24 (2): 136. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22771>.
- Havis Aravik, Achmad Iwan Hamzani. 2021. *POLITIK ISLAM: Sejarah Dan Pemikiran*. Edited by Nur Khasanah. Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=digXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA240&dq=sejarah+politik+islam&ots=JZ9Na2lWVvy&sig=zdWHPKFNhCRfmWNeJdTAvOSxuA&redir_esc=y#v=onepage&q=sejarah politik islam&f=false.
- <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>.
- ISLAM." Paramadina Graduate School of Islamic Studies. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1670>.
- Jamaludin, Jujun. 2023. "Dinasti Perspektif Islam."
- Panggabean, Ilham Budiman, and Aprilinda Martinondang Harahap. 2024. "Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7 (2): 1–15. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3169>.
- Rahma, Alvina Alya, Afifah Amaliah Oktaviani, Azmi Hofifah, Tsaqila Ziyah Ahda, and Rana Gustian Nugraha. 2022. "Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6 (1): 2260–69.
- Rais, Dr. M. Dhiauddin. 2001. *Teori Politik Islam*. Edited by Euis Erinawati. Jakarta: Gema Insani Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-fOsZhAHkM4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=pandangan+islam+tentang+politik&ots=MT4oA8FV4e&sig=k0LChnqxZ3sAKffRlAfOTKLvpmE&redir_esc=y#v=onepage&q=pandangan islam tentang politik&f=false.
- Rangkuti, Afifa. 2019. "Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5 (2): 40. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2191>.
- Zulhilmi, Arif. n.d. "DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN